



**SIARAN PERS**  
**Untuk Segera Diterbitkan**

**Di Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2017**  
**Komnas Pengendalian Tembakau Minta Pemerintah**  
**Ciptakan Regulasi yang Kokoh sebagai Perlindungan Masyarakat**

*“Jangan sampai ada uang dipakai untuk beli rokok  
dan tidak dipakai untuk menambah gizi anaknya.” – Presiden Joko Widodo*

**Jakarta, 30 Mei 2017** – Awal Februari tahun ini, Presiden Joko Widodo mengucapkan pesan di atas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2017. Pesan ini diikuti ucapan selanjutnya, **“Karena 2025-2030 akan ada bonus demografi. Kalau bonusnya nanti tidak berada pada kualitas yang baik justru akan menjadikan beban kita semuanya.”** Dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2017 yang jatuh pada 31 Mei, pesan ini menjadi begitu relevan bagi kita.

Seperti yang banyak disebutkan para ahli, bonus demografi yang sedang dinantikan bangsa ini akan membawa Indonesia berlimpah tenaga produktif. Hal ini akan membawa Indonesia pada puncak pembangunan yang diimpikan. Karena itu, kita tidak boleh kehilangan bonus demografi tersebut. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kita harus menjaga anak-anak kita pada kualitas yang baik sehingga kita bisa mencapai bonus demografi di tahun 2025 – 2030. Karena itu, kita harus memutus rantai generasi perokok dan menjaga generasi selanjutnya untuk tidak kembali jatuh pada cengkraman adiksi nikotin rokok yang mendegradasi produktivitas manusia.

Menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2017 dengan tema **“Rokok Ancaman bagi Pembangunan”**, Komnas Pengendalian Tembakau mengajak semua pihak untuk bersatu, bergerak bersama melakukan segala upaya untuk menjaga anak-anak kita dari jebakan konsumsi rokok demi pembangunan bangsa Indonesia yang lebih baik di masa depan. Karena itu, setiap tahun Komnas Pengendalian Tembakau berupaya merangkul seluruh sektor untuk melakukan usaha pengendalian tembakau di bidangnya masing-masing.

Prof Dr Emil Salim, Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Dewan Penasehat Komnas PT mengajak untuk melawan nikotin yang terdapat di dalam rokok, **“Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Mengapa hari ini penting, bukan karena kita memusuhi petani tembakau tetapi yang dimusuhi adalah zat nikotin yang dipakai untuk rokok karena membahayakan.”** Ketergantungan nikotin dari rokok dikhawatirkan akan menurunkan daya saing generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, perlu kiranya menjaga generasi muda Indonesia dari zat adiktif nikotin dan ribuan bahan kimiawi—dengan setidaknya lebih dari 70-nya bersifat karsinogenik—yang ada di dalam rokok terutama seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia muda di era bonus demografi.

Namun, tidak bisa kita mungkiri bahwa masih begitu banyak pekerjaan rumah yang kita pangku demi mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya konsumsi rokok. Kini, tanpa



regulasi yang kokoh untuk melindunginya, 250 juta lebih penduduk Indonesia masih harus berhadapan langsung dengan industri rokok yang tak kenal istirahat melakukan trik-trik promotif, termasuk dengan melestarikan mitos-mitos menyesatkan, untuk menjual produknya yang sangat berbahaya.

Alih-alih regulasi yang lebih baik dalam melindungi kesehatan, RUU Pertembakauan—yang telah begitu keras mendapat perlawanan dari rakyat tetap bertahan di Parlemen—kini telah memiliki Panitia Khusus (Pansus) untuk membahasnya. Secara diam-diam, Parlemen, dalam hal ini Badan Legislatif, juga siap menelurkan revisi UU Penyiaran yang menggadang-gadag akan menghapus pasal “larangan total iklan rokok dalam penyiaran” dari *draft* yang sudah mencantumkannya. Di sisi lain, kerangka kerja global pengendalian tembakau atau *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang seharusnya bisa menjadi alat yang efektif dalam perlindungan masyarakat dari bahaya konsumsi rokok justru tampak semakin jauh dari jangkauan.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Dr. dr. Prijo Sidipratomo Sp.Rad menyatakan bahwa “*Pertama*, Pemerintah Indonesia dan DPR jangan ragu-ragu lagi segeralah akses FCTC. *Kedua*, drop RUU Pertembakauan yang saat ini ada, yang akan dibicarakan oleh pemerintah dan DPR.” Sejalan dengan ini, Prof. Dr. Emil Salim mengungkapkan keprihatinan atas dibahasnya RUU Pertembakauan terutama karena terdapat klausul bahwa kretek adalah warisan budaya. “Bayangkan, tembakau yang memuat racun malah dijadikan warisan budaya bangsa,” tambahnya.

Karena itu, dalam rangka menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2017, Komnas Pengendalian Tembakau kembali menyerukan peringatan kepada pemerintah akan komitmen mereka dalam perlindungan hak masyarakat atas kesehatan, khususnya dari masalah konsumsi rokok. ***Ciptakan dinding perlindungan berupa regulasi yang kokoh dan menyeluruh untuk masyarakat!*** Jangan biarkan rakyat “berdiri telanjang” berhadapan langsung dengan industri rokok yang tak pernah kenyang meraup keuntungan dengan mengorbankan hak-hak asasi masyarakat, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Seperti yang tertuang dalam “Deklarasi Jakarta” yang dicanangkan pada *Indonesia Conference on Tobacco or Health 2017* (ICTOH - 16 Mei 2017) lalu, Komnas Pengendalian Tembakau kembali ikut menyerukan:

- Menolak disahkannya RUU Pertembakauan, karena bertentangan dengan upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta hak asasi manusia, termasuk dan terutama hak asasi anak sebagai generasi penerus bangsa.
- Memperjuangkan pelarangan total iklan, promosi, dan pemberian sponsor oleh industri rokok.
- Meningkatkan pajak dan cukai rokok, termasuk meningkatkan batas atas tarif cukai rokok yang berdampak pada peningkatan harga rokok sehingga menjadi tidak terjangkau oleh anak-anak dan keluarga miskin.



- Memperluas upaya diversifikasi tanaman tembakau dengan tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan pencapaian kedaulatan pangan.
- Mengaksesi FCTC yang merupakan salah satu *Means of Implementation* dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*).

\* \* \*

Keterangan lebih lanjut, hubungi Sekretariat Komnas PT di (021) 3917354 / [komnaspt@yahoo.or.id](mailto:komnaspt@yahoo.or.id)  
atau Media Officer: Nina Samidi (081290363685 / [midiasih@yahoo.com](mailto:midiasih@yahoo.com))

**Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):**

*Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.*